BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era digital yang dialami oleh masyarakat saat ini berkembang secara dinamis dengan segala perubahan signifikan yang mempengaruhi komunikasi hingga melakukan mobilisasi massa. Survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2020 menunjukkan 196 juta penduduk atau 73,7% masyarakat Indonesia telah terjangkau internet (Tim APJII, 2021, hlm. 1). Kebaruan teknologi dan kemudahan informasi pada abad 21 melahirkan keterbukaan masyarakat terhadap media sosial yang saat ini menjadi medium untuk saling berinteraksi. Keterbukaan tersebut tentu identik dengan keberadaan Generasi Z dengan karakteristik keterbukaannya akan hal baru. Menjadi kekuatan potensial untuk fasih terhadap teknologi, adaptif, serta memiliki pemikiran yang kritis.

Isu-isu persoalan gender di Indonesia pun tidak lepas dari jangkauan Generasi Z. Setiadi dan Kolip (2013) mengatakan persoalan gender tentu tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang krusial jika di dalam sebuah struktur sosial perbedaan kelamin tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun faktanya isu-isu ketidakadilan ini muncul dari gejala gender dimana salah satu kelompok menjadi korban ketidakadilan di dalam struktur tersebut. Mulai dari persoalan marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja, hingga kekerasan. Jika dikategori bentuk kekerasan gender pun cukup beragam, salah satunya ialah topik mengenai isu kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual menjadi topik yang hangat diperbincangkan baik melalui pemberitaan massa maupun media sosial. Melalui sosialisasi isu kekerasan seksual dengan narasi pengalaman korban yang diperuntukan guna memberi penyadaran kepada masyarakat akan permasalahan yang nyata, dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Tentu diharapkan hal tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat agar terhindar dari bentuk kekerasan seksual yang pernah dialami korban (Rentschler, 2014, hlm. 67).

Berbicara mengenai kekerasan seksual tentu menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diungkapkan, mirisnya hampir sebagian masyarakat pernah mengalami bentuk kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 mencatat bahwa pada masa pandemi covid 19 terjadi penurunan pengaduan diberbagai lembaga layanan, hal ini dikarenakan terkendala sistem dan juga pemberlakuan pembatasan sosial. Pada kenyataanya Komnas Perempuan menerima kenaikan pengaduan secara langsung dengan jumlah kenaikan aduan 2.389 kasus yang jika dipresentasikan sebanyak 40% (Komnas Perempuan, 2020, hlm. 1). Selain itu juga, data yang didapatkan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa penyumbang dalam kasus kekerasan baik sebagai korban maupun pelaku didominasi pada rentan usia 13-24 tahun yang jika diklasifikasikan merupakan Generasi Z, dengan rentan tahun lahir 1996-2004.

Data Komnas Perempuan juga mencatat pada tahun 2020, Jawa Barat menjadi daerah paling tinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 2.738 kasus. Tercatat 250 kekerasan terhadap perempuan yang ditangani UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung dengan 100 kasus kekerasan seksual (CATAHU Komnas Perempuan 2020, hlm. 3). Membahas data kekerasan seksual seperti melihat fenomena gunung es karena data yang diperoleh tidak merepresentasikan kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dan justru memungkinkan masih banyak korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya dan lebih memilih diam (Wulandari dan Krisnani, 2021, hlm. 187).

Baru-baru ini muncul fenomena dimana beberapa korban kekerasan seksual berani menceritakan bentuk kekerasan seksual yang pernah didupatkannya ke publik melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian “*COMPREHENSIVE SEXUAL EDUCATION MELALUI AKUN DIGITAL TABU.ID SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN REVIKTIMISASI KEKERASAN SEKSUAL*”. Dua dari tiga korban kekerasan seksual yang peneliti wawancarai pernah menceritakan pengalaman kekerasan seksual di akun media

sosialnya. Hal ini dilakukan korban, karena korban merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk bercerita serta guna memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa siapa saja dapat menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Temuan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan (Fileborn, 2017, hlm. 1486), dengan judul “*JUSTICE 2.0 STREET HARASSMENT VICTIMS USE OF SOCIAL MEDIA AND ONLINE ACTIVISM AS SITES OF INFORMAL JUSTICE*” mengungkapkan bahwa ruang digital menjadi situs keadilan informal bagi korban untuk memberi sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Keadilan secara *online* memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap keadilan sosial bagi korban yang mungkin tidak didapatkan secara nyata, serta memberikan ruang untuk korban mendapat dukungan dan pengakuan secara kolektif.

Kondisi idealis yang diharapkan pada kenyataannya sangat tidak sesuai dimana ruang digital justru memberikan kerentanan kepada korban kekerasan seksual, seperti dilansir dari portal berita digital Kumparan (19/04/2020). Billy Joe Ava disebut melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang merupakan kenalannya secara *online*. Korban membagikan tangkapan layar percakapan bersama Billy Joe Ava yang mencoba merayu korban namun tidak mendapat respon sama sekali dari pihak korban sampai akhirnya Billy Joe Ava mengirimkan foto bagian penis. Tindakan ini merupakan sebuah bentuk kekerasan berbasis gender online yang masuk dalam klasifikasi *revenge porn*, dimana adanya penyebarluasan konten pornografi dengan motif tertentu (McGlynn et al., 2017, hlm. 53). Menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialami oleh korban nampaknya dapat menjadi bumerang tersendiri. Korban menjadi lebih rentan, karena dapat dituntut secara hukum dengan pelanggaran UU ITE. Hal ini juga yang terjadi pada korban Billy Joe Ava, dimana pelaku melaporkan kembali korban dengan tuntutan pencemaran nama baik.

Kemudian dilansir dari pemberitaan massa Pikiran Rakyat (15/07/2021) seorang *content creator* Gofar Hilman melakukan tindak pelecehan seksual tiga tahun yang lalu kepada seorang perempuan di sebuah acara, hal ini berawal dari unggahan akun Twitter @quweenjojo yang membuat sebuah *thread* pada Juni 2021 dimana

menceritakan tindak pelecehan seksual yang dilakukan Gofar Hilman. Keberanian korban dalam menceritakan pelecehan seksual pada kasus ini mendapat sorotan yang luar biasa, masyarakat seolah terbagi menjadi dua pihak dengan perspektif yang berbeda. Satu pihak menganggap bahwa korban seolah mencari sensasi karena kasus pelecehan seksual yang diterimanya sudah lama dan justru mempertanyakan kenapa korban baru menceritakan setelah tiga tahun peristiwa itu terjadi. Berbeda pihak lain justru memberikan dukungan kepada korban dan sangat mengapresiasi tindakan korban karena sudah berani untuk menyuarakan bentuk ketidakadilan yang terjadi kepada dirinya (Wulandari dan Krisnani, 2021, hlm. 189). Namun proses advokasi dari kasus ini berhenti begitu saja dikarenakan korban mengunggah video klarifikasi permintaan maaf atas tuduhan yang dilayangkannya pada Februari 2022. Hal ini juga menjadikan perbincangan yang ramai di media sosial, sebagian masyarakat semakin menyudutkan pihak korban. Berbeda dengan pihak satu, pihak lain menganggap bahwa permintaan maaf yang dibuat korban atas dasar paksaan dari pelaku.

Kemudian kasus terbaru dialami oleh korban dengan inisial MS yang merupakan pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Dilansir dari BBS News Indonesia (15/09/2021), korban mendapat tindak pelecehan seksual oleh rekan kerjanya dimana buah zakar korban dicoret menggunakan spidol disertai perundungan yang berlangsung cukup lama hampir dua tahun. Tindakan ini merupakan bentuk kejahatan yang tidak manusiawi. Sebelumnya korban melakukan laporan kepada Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan disarankan untuk laporan ke kepolisian karena sudah termasuk tindak kriminal. Namun disayangkan korban tidak terfasilitasi dengan baik, dimana laporan yang dilakukan korban tidak diproses dan justru pihak kepolisian menyarankan untuk melaporkannya ke atasan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) saja. Melihat laporan yang tidak diproses pada akhirnya korban memberanikan diri untuk membuat sebuah press rilis di media sosial yang ditunjukan sebagai bentuk meminta pertolongan kepada presiden Joko Widodo karena telah dilecehkan oleh sekelompok rekan kerjanya di KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Permasalahan ini pun menjadi viral, dan akhirnya laporan korban ditindak lanjuti dan

korban mendapat pendampingan dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Sampai hari ini perkembangan kasus tersebut tidak terproses dengan baik karena pelaku meminta diselesaikan secara kekeluargaan dan korban diancam dituntut balik. Keberanian korban dalam menceritakan ulang tindak kekerasan seksual di ruang publik bukan merupakan keputusan yang mudah. Dari beberapa korban yang berani menceritakan kekerasan seksual yang viral di media sosial kita lihat bersama belum ada payung hukum yang memberikan jaminan kepada korban akan setiap aduan dapat ditangani dengan serius (Rahmi, 2018, hlm. 55).

Penyampaian pengalaman kekerasan seksual di media sosial yang dilakukan korban diharapkan dapat menjadi perhatian bersama agar terhidar dari bentuk kekerasan seksual yang sama, akan tetapi pada kenyataannya menyimpan berbagai konsekuensi negatif (Ott & Theunissen, 2015, hlm. 99). Alih-alih berupaya menggunakan media sosial sebagai medium untuk memberikan kesadaran secara luas kepada masyarakat serta mendapat dukungan sosial. Justru masih banyak masyarakat yang memberi komentar dengan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada korban, mulai dari orang terdekat disekitar korban seperti teman, keluarga, kerabat bahkan tidak jarang orang yang tidak dikenal pun mengintervensi korban apalagi jika sudah terpublikasi dalam pemberitaan massa (Wulandari dan Krisnani, 2021, hlm. 189).

Menceritakan peristiwa kekerasan seksual di media sosial merupakan sebuah fenomena baru. Fenomena ini disebut dengan “*Spill the tea*”. *Spill the tea* merupakan sebuah istilah yang tidak asing khususnya bagi pengguna Twitter, *spill the tea* biasanya dilakukan oleh seseorang untuk membuat utas dengan maksud menceritakan sebuah permasalahan yang terjadi salah satunya permasalahan kekerasan seksual yang pernah dialami (Madrangca, 2019, hlm. 3). Tentu fenomena ini mendapat atensi publik guna menumbuhkan kesadaran terkait isu kekerasan seksual agar tidak menjadi pemakluman. Serta menumbuhkan kewaspadaan bagi semua masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja.

Fenomena *Spill the tea* ini secara tidak langsung dapat memberikan sanksi sosial kepada pelaku karena tidak jarang korban sampai pada tahap mengungkapkan

identitas pelaku dalam tindak kekerasan seksual yang menyimpannya (*Call Out*). Ketika korban berani untuk melakukan tindakan *spill the tea* dan mengungkapkan identitas pelaku hal ini termasuk sebuah tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan individu dengan makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Hal ini didukung dengan pernyataan Alfred Schutz bahwa tindakan yang dilakukan setiap individu dalam hubungan sosial merupakan hasil berpikir (Hamid, 2013, hlm. 2). Pada dasarnya setiap tindakan individu kepada individu lainnya memiliki makna dan sebuah kesengajaan bagi aktor sendiri maupun oranglain sesuai maksudnya. Namun terkadang tujuan tersebut tidak dapat tercapai dengan baik. Tindakan yang dilakukan korban untuk melakukan *spill the tea* kekerasan seksual menjadikan korban lebih rentan untuk mendapat respon negatif dari lingkungan sosialnya, seperti menyalahkan korban, menyepelkan korban, bahkan membuat korban merasa ketakutan karena rasa bersalah yang dituduhkan (Dawtry et al., 2019, hlm. 162).

Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang memiliki rasa simpati terhadap korban, yang harus menjadi perhatian lebih ialah dampak setelahnya. Keselamatan korban sangat memungkinkan terancam dan korban lebih rentan untuk menjadi korban lagi dengan kata lain terreviktimisasi. Belum lagi jika pelaku merupakan seorang publik figur yang memiliki basis massa, dimana korban yang seharusnya mendapat dukungan justru dibanjiri oleh komentar negatif yang cenderung memojokkan bahkan komentar yang diberikan bernafaskan kekerasan. Tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan bentuk reviktimisasi. Ditemukan data bahwa sekitar dua dari tiga individu yang menjadi korban kekerasan seksual akan direviktimisasi atau kemungkinan akan menjadi korban kembali (Classen, C. C., Palesh, O. G. and Aggarwal, 2005, hlm. 111). Hal ini menunjukkan bahwa ketika seharusnya korban mendapat perlindungan sangat disayangkan masyarakat sekitar justru menormalisasi kekerasan seksual yang terjadi maka tidak heran sebuah reviktimisasi akan dianggap wajar (Widiastuti, 2020a, hlm. 7).

Beberapa temuan diatas menunjukkan bahwa kepentingan korban sering kali gagal mendapat perlindungan. Keadaan masyarakat yang cenderung menutup mata pada kasus-kasus kekerasan seksual adalah bentuk nyata dari langgengnya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia (Rahayu dan Agustin, 2019, hlm. 116). Dari temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, mengungkapkan bahwa lingkungan yang menormalisasi adanya kekerasan seksual seperti tindakan *victim blaming* menjadikan masyarakat tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pelaku baru sehingga menjadikan korban tereviktimisasi. Sebaliknya masyarakat yang merupakan lingkungan sosial korban justru harus memberikan dukungan (Koctuck dan Bilge, 2018, hlm. 7)

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana keputusan korban dalam melakukan tindakan *spill the tea* kekerasan seksual di media sosial. Kemudian bagaimana penerimaan *followers* sebagai lingkungan sosial korban serta dampak yang didapatkan korban setelah melakukan tindakan *spill the tea* kekerasan seksual di media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam merekonstruksi penerimaan masyarakat terhadap korban maupun penyintas kekerasan seksual. Tentu dengan begitu, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan seksual serta menciptakan masyarakat yang berperspektif korban. Dengan demikian masyarakat akan lebih berpihak pada korban kekerasan seksual sebagaimana mestinya yaitu menjadi pendukung sosial bagi korban dan mampu mencegah terjadinya reviktimisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dituliskan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “FENOMENA *SPILL THE TEA* KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL PADA GENERASI Z KOTA BANDUNG”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah utama dalam penelitian yaitu “Bagaimana Fenomena *Spill The Tea* Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Generasi Z Kota Bandung?”. Agar penelitian lebih

terfokus pada pokok permasalahan, maka disusun sejumlah pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Bagaimana korban kekerasan seksual memutuskan untuk melakukan *spill the tea* kekerasan seksual yang pernah dialami di media sosial?
- 2) Bagaimana penerimaan yang diberikan *followers* terhadap korban yang melakukan tindakan *spill the tea* kekerasan seksual di media sosial?
- 3) Bagaimana dampak yang didapatkan korban kekerasan seksual setelah melakukan *spill the tea* kekerasan seksual yang pernah dialami di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk dapat menganalisis bagaimana fenomena *spill the tea* kekerasan seksual di media sosial pada generasi Z kota Bandung.

Selain tujuan umum di atas, penelitian ini memiliki tujuan khusus sesuai dengan pembatasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan korban kekerasan seksual saat memutuskan untuk melakukan *spill the tea* kekerasan seksual yang pernah dialami di media sosial.
- 2) Mengidentifikasi bentuk penerimaan yang diberikan *followers* korban terhadap *spill the tea* kekerasan seksual yang dilakukan korban di media sosial.
- 3) Mengidentifikasi dampak yang didapatkan korban setelah melakukan *spill the tea* kekerasan seksual yang pernah dialami di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoretis

Mampu memberikan referensi baru mengenai fenomena *spill the tea* kekerasan seksual di media sosial sebagai ruang kesadaran bagi masyarakat terkait isu kekerasan

seksual tetapi disatu sisi menjadi ruang reviktimisasi bagi korban. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu merekonstruksi penerimaan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual agar tidak mendapat reviktimisasi dari lingkungan sosialnya. Kemudian memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya keilmuan sosiologi sebagai kajian dalam mata kuliah sosiologi gender serta sistem dan perubahan sosial. Sehingga mampu mewujudkan lingkungan sosial dengan perspektif *gender equality and social inclusion* (GESI).

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, memberikan informasi mengenai fenomena *spill the tea* kasus kekerasan seksual di media sosial serta melalui kajian ini dapat mewujudkan keilmuan yang berperspektif *gender equality and social inclusion*.
- b. Bagi Peneliti sebagai Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, dapat memahami gejala sosial mengenai perubahan pola interaksi antar masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kita khususnya sebagai akademisi untuk lebih berpihak kepada korban dnegan tidak melakukan *victim blaming* karena merupakan salah satu bentuk reviktimisasi yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual.
- c. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi universitas dalam mengkaji regulasi pencegahan kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan mampu menciptakan ruang aman baik bagi korban kekerasan seksual, penyintas, maupun seluruh civitas akademik yang mengindahkan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi pemangku kebijakan untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan kekerasan seksual. Dilihat dari urgensi yang memang

dibutuhkan untuk para korban kekerasan seksual untuk segera mendapat perlindungan hukum yang berpihak pada korban.

- e. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual dengan merekonstruksi stigma masyarakat terhadap korban maupun penyintas kekerasan seksual. Masyarakat akan lebih berpihak pada korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya reviktimisasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan moril.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian yang ditujukan untuk penyusunan skripsi ini kepada berbagai pihak yang berkepentingan, laporan penelitian ini disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur kepenulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, peneliti memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi yang peneliti laksanakan pada penelitian sebagai dasar utama dalam penelitian.
- BAB II** : Kajian Pustaka, peneliti menguraikan dokumen-dokumen atau data data yang berkaitan dengan fokus penelitian, kerangka pemikiran peneliti, serta teori-teori yang relevan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.
- BAB III** : Metode penelitian, peneliti memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan yang digunakan dalam penelitian.
- BAB IV** : Temuan dan Pembahasan, peneliti melalui data yang telah terkumpul dalam penelitian yang dilaksanakan selanjutnya akan dijabarkan melalui tahap analisis mengenai data penelitian tersebut.

BAB V : Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, peneliti melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan penelitian, mengidentifikasi simpulan yang telah didapatkan dan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data yang diperoleh dalam penelitian.